ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 138/PUU-VII/2009 BERDASARKAN ASAS *IUS CURIA NOVIT*

Mula Raja Sihombing¹, Dessy Artina², Muhammad Zulhidayat³

mula.raja4134@student.unri.ac.id¹, dessy.artina@lecturer.unri.ac.id²,

zulhidayat@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Permasalahan kewenangan dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi sebuah permasalahan kontemporer dalam ranah Hukum Tata Negara Indonesia yang menarik untuk dibahas berdasarkan perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara, hal ini sebagai upaya revitalisasi kelimuan untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik dan dinamis dalam ranah hukum. Sehingga besar harapan bahwa dari hasil kajian atau pembahasan permasalahan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan konsitusi yang mendekati keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak veto presiden terhadap rancangan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak veto presiden terhadap rancangan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan hak veto presiden terhadap rancangan peraturan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sifat dari penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait engan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 merupakan suatu putusan yang membuka gerbang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang membuat Mahkamah Konstitusi menambah sendiri kewenangannya padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, sehingga Putusan Mahkamah konstitusi tersebut membuat Fenomena two in one dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut juga mengubah tekstual UUD NRI 1945 padahal hal tersebut merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Putusan.

ABSTRACT

The issue of authority in reviewing Government Regulations in Lieu of Laws (Perpu) is a contemporary problem in the realm of Indonesian Constitutional Law which is interesting to discuss based on the perspective of the 1945 Constitution which is the country's basic constitution, this is an effort to revitalize knowledge to move towards better change. and dynamic in the legal realm. So there is great hope that the results of the study or discussion of this problem can become something useful for all of us in carrying out national and state life under the auspices of a constitution that approaches justice for all Indonesian people. The purpose of writing this thesis is: first, to find out how the legal regulation of the presidential veto right on draft laws in Indonesia

and the United States is. Second, to find out the similarities and differences in the presidential veto right to draft laws in Indonesia and the United States. Third, to find out the advantages and disadvantages of the president's veto right to draft legal regulations in Indonesia and the United States. The research method in this thesis uses normative juridical research, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. The nature of this thesis research is descriptive research that systematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. The data collection method used in this research is firstly literature study, which is a technique for obtaining secondary data through documents related to the problem, objectives and benefits of research, then after the data collected and then analyzed to draw conclusions. Based on the research results, Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009 is a decision that opens the gates for reviewing government regulations in lieu of laws which makes the Constitutional Court increase its own authority even though the authority of the Constitutional Court has been regulated in Article 24C of the 1945 Constitution, so that the Constitutional Court's decision creates a two-in-one phenomenon in testing. Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court and the House of Representatives. Apart from that, the Constitutional Court through this decision also changed the textual content of the 1945 Constitution, even though this is within the authority of the People's Consultative Assembly.

Keywords: *Constitutional Court, House Of Representatives, Government Regulations In Lieu Of Law, Decesion.*

PENDAHULUAN

Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disusul dengan Pemberlakuan Undang Undang Dasar (UUD) pada tanggal 18 Agustus 1945, maka semenjak itu Indonesia menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat yang memiliki Konstitusi dasar sebagai pedoman dalam bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus mempunyai Konstitusi/Undang Undang Dasar sebagai dasar dan asas dalam penyelenggaraan negara.

Seiring berjalannya waktu Indonesia mengalami beberapa kali penggantian dan perubahan Konstitusi, diantaranya pada tahun 1949 ketika bentuk Negara Republik Indonesia menjadi Negara Serikat, maka terjadi penggantian konstitusi dasar dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan pada tahun 1950 ketika bentuk negara diubah lagi menjadi Kesatuan maka konstitusi RIS diganti menjadi Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 . Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 pada saat Dekrit Presiden dikeluarkan maka konstitusi dasar Indonesia diganti lagi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945. Pada masa selanjutnya Konstitusi Indonesia tidak mengalami penggantian tetapi perubahan atau amandemen yaitu pasca tumbangnya rezim orde baru.

Pada tanggal 21 Mei 1998, era baru perjalanan bangsa Indonesia dimulai dimana Presiden Soeharto mengundurkan diri pasca menjabat selama 32 tahun. Era Reformasi dimulai dan muncul keinginan untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945. Indonesia telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat pada tahun 2002. Pasal 24 ayat (2) hasil perubahan (amandemen) ketiga bulan November 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi bertambah dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Pengadilan Konstitusi (Constitutional Court) yang sebelumnya tidak ada.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan

dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang baru di Indonesia disertai dengan beberapa kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD NRI 1945 hasil amandemen dimana pada ayat (1) “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ” dan pada ayat (2) “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Mahkamah Konstitusi adalah satu satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan secara Konstitusional dapat menafsirkan Konstitusi . Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Penggunaan metode penafsiran konstitusi oleh hakim secara tepat lebih dapat menjamin objektivitas hakim dalam menetapkan putusannya, meskipun patut diakui bahwa objektivitas dimaksud tetap saja tidak dapat sepenuhnya lepas dari aspek subjektivitas masing-masing hakim, namun dalam hukum, hal itu tetap saja harus diupayakan hakim semaksimal mungkin. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata dari keseimbangan kontrol diantara lembaga-lembaga negara dan merupakan penegasan terhadap prinsip- prinsip negara hukum.

UUD NRI 1945 memang di desain sebagai aturan atau norma umum dimana hal ini sesuai dengan pembagian norma hukum yang dilakukan oleh Hans Nawiasky , dimana untuk penjabaran lebih lanjut diatur melalui Peraturan Perundangan di bawahnya. Sebagaimana diketahui, kedudukan Undang Undang adalah berada di bawah Undang-Undang Dasar, lebih jauh ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 7 hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan hasil kristalisasi oleh pemerintah (dalam arti luas) dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, mengutip pengertian dari Jimly Asshiddiqie bahwa norma adalah pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Kewenangan untuk membentuk Perppu berada pada presiden yaitu dalam hal kegentingan yang memaksa, hal ini berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, yaitu :

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Mengingat bahwa Undang-Undang Dasar tidak memiliki penjelasan secara resmi, maka yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa memungkinkan munculnya berbagai macam interpretasi atau penafsiran terhadap kategori kegentingan memaksa. Pada sidang pleno 8 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang perkara Permohonan Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Putusan MK tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan ahli hukum tata negara. Sebagian pendapat, yang diwakili antara lain Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau lazim disingkat Perppu . Sebab, terdapat mekanisme tersendiri untuk menguji Perppu meskipun kedudukannya sederajat. Pendapat lain, menilai bahwa MK berwenang menguji Perppu sepanjang terdapat pelanggaran hak konstitusionalitas. Saldi Isra dengan mengacu pada Putusan MK di atas menilai, MK dapat menguji Perppu.

Permasalahan kewenangan dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi sebuah permasalahan kontemporer dalam ranah Hukum Tata Negara Indonesia yang menarik untuk dibahas berdasarkan perspektif UUD NRI 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara, hal ini sebagai upaya revitalisasi kelimuan untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik dan dinamis dalam ranah hukum. Sehingga besar harapan bahwa dari hasil kajian atau pembahasan permasalahan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan konsitusi yang mendekati keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah tulisan Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, Donald A. Rumokoy dan Carlo A. Gerungan dengan judul “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VII/2009” Walaupun dalam penelitian sebelumnya juga menggunakan Studi Putusan yang sama namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya membahas Bagaimana Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Dalam Hirarki Peraturan Perundang Undangan dan Bagaimana Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Sedangkan untuk penelitian ini akan membahas Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 berdasarkan Asas Ius Curia Novit dan Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 terhadap Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun dengan studi Putusan yang sama.

Selanjutnya ada juga penelitian sebelumnya yang berkaitan juga, yaitu tulisan Iman Karim dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang” Penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian saya. Dimana penelitian ini membahas Bagaimana Prosedur dan Mekanisme dalam melakukan Yudisial Review Menurut Undang Undang dan Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Penelitian ini dalam kesimpulannya menjelaskan adanya ketentuan mengenai legal standing, dimana tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan penulis tersebut berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 Berdasarkan Asas Ius Curia Novit”

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin yang diterjemahkan Bismar Nasution, yang menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*. Menurut Sunaryati Hartono, Dalam Penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Dalam penelitian hukum normatif kecenderungan dalam menciptakan hukum sebagai disiplin perspektif dimana dalam hal ini penelitian ini menggunakan penelitian terhadap asas hukum.

Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif dimana menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi mendapatkan perluasan kewenangannya melalui Putusan MK dan menyebabkan adanya pro kontra. Selain itu dampak Putusan MK tersebut menyebabkan adanya sengketa kewenangan lembaga negara antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 berdasarkan Asas Ius Curia Novit

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 terbilang unik, meskipun Mahkamah menyatakan melalui amar putusan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima, namun di dalam konklusi Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Para pemohon yang mengajukan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini bukannya tidak menyadari bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Akan tetapi, pemohon mendalilkan bahwa Perpu mempunyai kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki) dengan Undang-Undang (UU). Hal ini menurut pemohon dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa kedudukan UU dan Perpu adalah sejajar.

Dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pemohon, namun Mahkamah Konstitusi menggunakan alasan yang tidak sesederhana sebagaimana dikonstruksi oleh para pemohon yang mendasarkan keberwenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstiusionalitas Perpu lebih karena kedudukan Perpu yang sejajar dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundangan. Mahkamah Konstitusi memberi makna kontekstual pada UUD NRI 1945 dengan interpretasi sosiologis dan teleologis sehingga teks konstitusi yang ada diinterpretasi untuk memenuhi rasa keadilan. Putusan ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi memperlakukan UUD NRI 1945 sebagai dokumen yang hidup (*living document*), sebagai sebuah *living constitution* ketimbang sebagai *dead constitution*.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan. "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang dan oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.

Meskipun demikian, ada satu Hakim Konstitusi yang memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion) yaitu Mahfud MD dan satu Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (Disenting Opinion) yaitu Muhammad Alim.

Hakim Konstitusi Mahfud MD yang pula menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa jika dirunut dari original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan uji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menurut Mahfud tidak menyebutkan Perpu sebagai salah satu produk hukum yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Jika Perpu memang diperbolehkan diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sudah barang tentu ketentuan ini akan dijumpai dalam UUD NRI 1945. Mahfud mengakui bahwa muatan suatu Perpu mengatur materi muatan UU, hanya saja Perpu dibuat dalam keadaan kegentingan yang alasan alasannya tergantung subjektifitas Presiden. Justru karena kegentingannya itulah Perpu berlaku sebagai UU, namun jika telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditolak, maka Perpu tersebut dicabut atau dibatalkan. Jika Perpu tersebut disetujui, maka Perpu menjadi UU. Menurut logika hukum ini, demikian Mahfud, kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak uji terhadap Perpu baru ada apabila Perpu sudah diuji, dinilai, dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta disetujui menjadi UU. Mahfud mensitir kajian akademik yang dilakukan di kampus-kampus pada tahun 2000-2001 mengenai judicial review Perpu oleh lembaga kehakiman yang pada intinya menganggap uji Perpu oleh lembaga kehakiman sebagai “perampasan” hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini karena menurut UUD NRI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk menilai suatu Perpu apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi UU ataukah tidak. Kesamaan muatan Perpu dengan UU bukanlah alasan untuk membenarkan kewenangan menguji Perpu oleh lembaga kehakiman.

Namun demikian, Mahfud menilai bahwa dalam menguji, tidak bisa hanya sekedar mendasarkan pada original intent, tafsir gramatik maupun tafsir historik, melainkan pula dengan memberdayakan tafsir sosiologis/teleologis. Oleh karenanya kendati memahami bahwa pada dasarnya uji Perpu dengan pendekatan tafsir tertentu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi ia menyetujui kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu dengan mendasarkan pada empat alasan berikut:

1. Masih ada ketidakjelasan terkait frasa “pada sidang berikutnya” dalam konteks nasib suatu Perpu setelah diberlakukan oleh Presiden. Ada yang menyebutkan sidang berikutnya adalah masa sidang persis setelah Perpu diundangkan, namun ada juga yang meyakini bahwa sidang berikutnya bisa kapan saja, sehingga terbuka kemungkinan untuk menunda (buying time) pembahasan Perpu. Dalam konteks Perpu yang dimohonkan oleh Pemohon, diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak membahas Perpu 4/2009 dalam sidang berikutnya yakni 1 Oktober hingga 4 Desember 2009. Disini, ada kekhawatiran bahwa jika pembahasan suatu Perpu diulur-ulur pelaksanaannya padahal suatu Perpu bertentangan dengan konstitusi maka akan timbul ketidakpastian, sehingga terhadap Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Adalah wajar bahwa kewenangan menguji Perpu dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi

karena pengalaman menunjukkan adanya Perppu yang telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya tidak nyata nyata diterima, namun pula tidak nyata-nyata ditolak. Alih alih memilih salah satu dari dua opsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat malahan memberikan saran kepada Presiden untuk membuat suatu Rancangan Undang-Undang yang mengatur hal sebagaimana diatur oleh Perppu. Hal ini menyebabkan suatu Perpu tidak memiliki kepastian hukum, karena bisa jadi ada Perppu yang terus berlaku kendati tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Tidak ada kepastian hukum terkait mengenai sampai kapan Perppu yang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus diganti dengan undang-undang pencabutan atau undang undang pengganti. Ketidakjelasan mengenai hal ini telah menimbulkan persoalan yakni suatu Perppu yang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat baru diajukan pencabutannya atau diajukan Rancangan Undang Undang yang baru manakala terjadi suatu permasalahan terkait Perppu.
4. Ada kemungkinan Perppu yang dibuat oleh Presiden diajukan dalam kondisi ketika Dewan Perwakilan Rakyat secara politik tidak dapat bersidang baik karena keadaan sedang tidak normal maupun sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar tidak dapat bersidang. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan dikeluarkan Perppu yang isinya melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa.

Berlainan dengan Hakim Konstitusi Mahfud M.D. dan tujuh hakim konstitusi yang lain, Hakim Konstitusi Muhammad Alim sebagai hakim yang memiliki pendapat berbeda pada intinya mengemukakan bahwa kewenangan untuk menguji Perpu oleh Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada secara tegas tercantum dalam UUD NRI 1945 maupun sumber hukum tata negara lainnya.

Oleh karenanya, Muhammad Alim meyakini bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak berwenang menguji Perpu. Ia menegaskan bahwa baik UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, maupun UU Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Selanjutnya Alim dalam Putusan tersebut mengkaitkan pendapat yang berbeda itu dengan Pasal 20 UUD NRI 1945 yaitu kewenangan membentuk undang-undang dan Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perppu yang sudah lebih dahulu ada daripada Pasal 24C ayat (1), namun Pasal 24C ayat (1) hanya menyebut menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar.”

Alim mengatakan bahwa dalam konteks pada saat dirumuskannya Pasal 24C ayat (1), tata urutan perundangan Indonesia menurut Tap MPR No. III/MPR/Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan yang menempatkan Perpu di bawah Undang-Undang. Meskipun demikian, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 hanya memberi kewenangan untuk , “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Alim menggaris bawahi bahwa kewenangan menguji undang-undang (tanpa menyebut Perppu) terhadap UUD NRI 1945 dan Perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No.III/MPR/ Tahun 2000 merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat lalu dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya sebatas menguji undang undang Terhadap UUD NRI 1945, tidak termasuk menguji Perpu, tidak pula termasuk menguji Tap MPR. Alim menyimpulkan, bahwa hal demikian dengan terang menunjukkan bahwa kewenangan menguji Perpu memang tidak diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi Muhammad Alim berpendapat bahwa tidak disebutkannya Perppu sebagai produk hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dalam Pasal 24C ayat (1) 1945 adalah petunjuk bahwa pembuat UUD NRI 1945

menyerahkan pengujian UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jika suatu Perpu telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya dan disetujui menjadi UU sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, maka barulah kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU tersebut. Ia kemudian mencontohkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan setelah peristiwa yang dikenal sebagai Bom Bali setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU diujikan konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi Muhammad Alim dalam dissenting opinion juga menyebutkan perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari UUD NRI 1945, misalnya Tap MPR Nomor III Tahun 2000, yang menetapkan tata urutan perundang-undangan yang meletakkan Perppu dibawah Undang-Undang. Kemudian setelah UU No. 10 Tahun 2004 disahkan baru memposisikan Perppu setara dengan Undang-Undang tidak dapat mengubah UUD NRI 1945, yakni pasal 24C ayat (1) yang hanya menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tanpa menyebutkan kewenangan menguji Perppu. Menutup argumennya, Alim mengutip Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.” Kewenangan yang berdaulat harus dilaksanakan menurut UUD NRI 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penambahan kewenangan menguji Perpu padahal UUD NRI 1945 tidak memberikan kewenangan untuk itu menurut Alim adalah menyimpang dari UUD NRI 1945.

Meskipun Hakim Konstitusi Muhammad Alim berbeda pendapat atau dissenting opinion namun Mahkamah tetap menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Putusan ini kemudian menjadi suatu hal yang baru dimana Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan kewenangannya sendiri padahal kewenangannya telah diatur dalam UUD NRI 1945.

Asas Ius Curia Novit berarti hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara. Berdasarkan adagium Ius Curia Novit hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkrit.

Bila kita lihat dari Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi, meskipun pada awalnya UUD NRI 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang Undang terhadap UUD NRI 1945 namun apabila kita kaitkan dengan Asas Ius Curia Novit yaitu Hakim dianggap mengetahui hukum dan apabila dikaitkan dengan Teori Pertimbangan Hakim menurut Mackenzie dimana ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pendekatan keseimbangan, pendekatan seni dan intusi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, pendekatan ratio decidendi, dan pendekatan kebijaksanaan.

Apabila kita melihat lebih teliti pertimbangan hukum dalam putusan ini Mahkamah sependapat dengan dalil pemohon dimana Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu), namun Mahkamah menggunakan dalil yang tidak sederhana namun Mahkamah Konstitusi memberi makna kontekstual pada UUD NRI 1945 dengan interpretasi sosiologis dan teleologis untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan dengan teori Pertimbangan Hakim menurut Mackenzie yaitu dengan pendekatan seni dan intusi dimana Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menggunakan penafsiran gramatikal semata.

Putusan ini menandakan bahwa Hakim Konstitusi tidak hanya terpaku pada tafsir gramatikal semata namun juga dapat menggunakan pendekatan seni dan intusi dimana Hakim Konstitusi dapat mengali pasal pasal dalam UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dengan menempatkan Pasal 22 yang mengatur

kewenangan Presiden dalam membuat Perpu dalam konteks UUD NRI 1945 hasil perubahan I, II, III, dan IV. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pasal mengenai Perpu diletakkan dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Materi Bab VII terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B, yang mengatur tentang kelembagaan DPR (Pasal 19, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22B) serta materi mengenai pembuatan undang-undang sebagai hasil Perubahan I dan II.

Bertolak dari fakta keberadaan pasal mengenai Perpu yang berada dalam Bab VII UUD NRI 1945 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa sesungguhnya materi Perpu adalah materi undang-undang, hanya saja karena dilahirkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, ia tidak melalui sebuah prosedur yang normal karena akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Selanjutnya karena sebuah Perpu berlaku mengikat secara umum, maka pada hakekatnya sebuah Perpu memiliki sifat sebagai undang-undang, yang oleh karenanya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan ini menyatakan berwenang menguji Perpu.

Berdasarkan hal di atas jika dikatkan pula dengan Asas *Ius Curia Novit* maka peneliti sepakat apabila Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Perppu walaupun kewenangan itu tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 maupun aturan turunan lainnya dikarenakan Perppu itu sederajat dengan UU dan meskipun hanya dibuat oleh Pemerintah dan Perppu hanya bersifat sementara namun karena materi muatannya sederajat dengan UU maka berpotensi merugikan Hak Konstitusional warga negara.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 Terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 138/PUU-VII/2009 membawa perubahan yang cukup berdampak terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia yang membuka gerbang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dikatakan demikian dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945 namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya malah menambah kewenangannya sendiri dan apabila kita perhatikan secara seksama Putusan tersebut ternyata mengubah tekstual atau menambah tekstual UUD NRI 1945 padahal yang dapat mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun Perubahan tekstual UUD NRI 1945 yang dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan tidak perlu ditanggapi berlebihan, karena dalam ilmu ketatanegaraan hal ini bisa saja terjadi, apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Putusan ini juga memiliki implikasi adanya fenomena *two in one* dalam pengujian Perppu dimana Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi sama-sama menjalankan kewenangannya dalam waktu bersamaan. Setidaknya ada tiga bentuk fenomena *two in one* pengujian Perppu yang dapat terjadi. Pertama, jika terjadi *judicial examination for constitutionality to Perppu pre legislative review*, yaitu adanya *judicial review* Perppu di Mahkamah Konstitusi akan tetapi setelah itu atau tidak lama kemudian terjadi pula *legislative review* Perppu di Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, jika terjadi *judicial examination for constitutionality to Perppu postlegislative review*, yaitu adanya *judicial review* Perppu di Mahkamah Konstitusi padahal sebelumnya *legislative review* Perppu di Dewan Perwakilan Rakyat sedang berjalan. Ketiga, bisa juga kemungkinan adanya *judicial review* Perppu di Mahkamah Konstitusi baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua sebagaimana dimaksud di atas tapi dalam waktu yang berlarut-larut Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: "Perppu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Pengalaman Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi fenome two in one yaitu ketika Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya yaitu melakukan Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK). Mahkamah Konstitusi melakukan sidang perdana judicial review Perppu MK pada tanggal 12 November 2013, akan tetapi sebelum judicial review tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat sudah lebih dulu melalui legislative review yang pada akhirnya menyetujui Perppu MK menjadi undang-undang pada tanggal 19 Desember 2013 dalam Sidang Paripurna melalui mekanisme voting.

Tentunya dengan adanya hasil legislative review yang menyetujui Perppu MK menjadi undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi menanggapi dengan bijak sebagaimana telah tertuang dalam empat putusannya yaitu: Putusan MK No. 91/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 92/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 93/PUU-XI/2013, dan Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013. Dalam keempat Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa: “Permohonan pemohon tidak dapat diterima” yang tentunya dengan dasar pertimbangan pemohon telah kehilangan objek permohonannya yaitu Perppu Mahkamah Konstitusi sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang.

Kedua, ketika Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya yaitu melakukan Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perppu Pilkada) dan Perppu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda), sebelum Mahkamah Konstitusi memutus perkara Perkara judicial review Perppu Pilkada dan Perppu Pemda tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat melalui legislative review dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 Januari 2015 telah menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi undang-undang. Pada 18 Februari 2015 berdasarkan Putusan MK No. 118-119-125-126-127-129130-135/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan bahwa: “Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” dengan dasar pertimbangan para Pemohon telah kehilangan objek permohonannya, yaitu Perppu Pilkada dan Perppu Pemda sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang.

Ketiga, ketika Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya yaitu melakukan pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Mahkamah Konstitusi melakukan sidang perdana judicial review Perppu Ormas pada tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi sebelum judicial review Perppu Ormas diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat sudah lebih dulu melalui legislative review yang pada akhirnya menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Sidang Paripurna melalui mekanisme voting setelah gagal mencapai musyawarah mufakat.

Tentunya dengan adanya hasil legislative review yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi menanggapi dengan bijak sebagaimana telah tertuang dalam enam putusannya yaitu: Putusan MK No. 38/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 41/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 48/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 49/PUU-XV/2017, dan Putusan MK No. 52/PUU-XV/2017.

Dalam keenam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa “Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” yang tentunya dengan dasar pertimbangan pemohon telah kehilangan objek permohonannya yaitu Perppu Ormas sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang. Tentu saja dasar Mahkamah Konstitusi

dalam menguji perpu di atas adalah Putusan MK NO. 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan Mahkamah berwenang menguji, mengadili, dan memutus perkara pengujian Perpu.

Apabila kita lihat dalam tabel, seperti ini bentuk fenomena two in one Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

No.	Hak Uji	Isi Putusan Mahkamah Konstitusi	Penggunaan Hak Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat
1.	Uji Formil	Dalam hal Putusan MK menyatakan bahwa formalitas Perpu sesuai dengan konstitusi	DPR tetap harus menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerima Perpu atau menolaknya
		Dalam hal putusan MK menyatakan bahwa formalitas Perpu bertentangan dengan konstitusi	Hak konstitusional DPR atas Perpu itu menjadi hilang kerana Perpu telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2.	Uji Materil	Dalam hal putusan MK menyatakan ayat-ayat Perpu yang dimohonkan, tidak bertentangan dengan konstitusi	DPR tetap harus menggunakan hak konstitusionalnya (<i>political review</i>) atas Perpu dimaksud (yang masih asli itu)
		Dalam hal putusan MK menyatakan ayat-ayat Perpu yang dimohonkan, bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	DPR tetap harus menggunakan hak konstitusionalnya (<i>political review</i>) atas Perpu dimaksud (yang sudah mengalami uji materiel oleh MK). Materi Perpu itu menjadi tidak seperti awalnya/aslinya.

Dalam hal putusan MK menyatakan ayat-ayat Perpu yang dimohonkan, bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. DPR tetap harus menggunakan hak konstitusionalnya (*political review*) atas Perpu dimaksud (yang sudah mengalami uji materiel oleh MK). Materi Perpu itu menjadi tidak seperti awalnya/aslinya.

Dalam hal Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 telah membuka Pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi namun sampai saat ini belum ada amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan untuk mengubah atau menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam UUD NRI 1945 menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat namun Indonesia yang cenderung menggunakan sistem hukum civil law dimana hakim terikat pada peraturan perundang-undangan bukan yurisprudensi. Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai Presidential Treshold yaitu Putusan MK No. 62/PUU-XII/2024 yang menguji Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dibacakan pada tanggal 2 Januari 2025 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan presidential treshold Inkonstitusional. Dalam putusan tersebut jelas Mahkamah menyatakan akhirnya bergeser pendirian dari putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan presidential treshold yang menyatakan bahwa kebijakan presidential treshold adalah open legal policy atau kebijakan pembuat undang-undang padahal Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Dari sini dapat kita lihat bahwasanya walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat namun dikarenakan Indonesia lebih cenderung dikatakan menggunakan sistem hukum civil law dimana hukum itu terkodifikasi dan sumber hukum utama adalah perundang-undangan sehingga hakim tidak memiliki kewajiban untuk

mengikuti yurisprudensi.

Dalam hal memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana dijelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi produk dari perundang-undangan. Maka dari itu penting untuk dilakukan amandemen UUD NRI 1945 khususnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perppu dan bagaimana mekanismenya agar fenomena two in one atau pengujian Perppu yang dilakukan bersamaan oleh Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak terjadi lagi.

Karena hal ini dapat memberikan ketidakpastian hukum dimana bagaimana nanti jika ada satu Perppu yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan Inkonstitusional namun dalam hal yang berdekatan atau bersamaan Dewan Perwakilan Rakyat justru menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Tentu hal ini nantinya akan memberikan suatu ketidakpastian hukum terhadap Perppu tersebut. Karena keduanya merupakan lembaga negara yang sejajar, dimana Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan berdasarkan UUD NRI 1945 untuk menyetujui atau menolak Perppu yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam hal Putusan juga bersifat final dan mengikat dan hal ini juga diatur dalam UUD NRI 1945.

SIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah putusan yang unik karena dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki legal standing namun dalam konklusi Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 membuka gerbang pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perpu) di Indonesia ditandai dengan adanya beberapa kali pengujian Perpu yaitu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Perppu MK), Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perppu Pilkada) dan Perppu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda), Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Naumn pengujian Perpu diatas mengalami fenomena two in one dimana Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu bersamaan melakukan pengujian terhadap Perpu tersebut.

Saran

1. Penulis memberikan saran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan amandemen (perubahan) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 agar lebih memberikan kepastian hukum serta tidak ada lagi fenomena two in one dalam pengujian Perpu.
2. Penulis juga memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden apabila UUD NRI 1945 telah dilakukan amandemen (perubahan) terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dapat dilakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, 2010, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Sinar
- _____, dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Cetakan Kesembilanbelas, Depok, Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal

- Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Basrah, Sjahran, 1987, Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan, Cetakan III, Penerbit Alumni Bandung.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994 Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Environment, Asian Journal of, 2019, History and Heritage, Vol. 3, Issue. 1, 87-98
- Hamidi, Jazim, 2006, Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI. Konstitusi press, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2016, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2009, Ilmu Perundang-undangan. Pusbangdik. Riau
- Huda, Ni'matul, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lon L. Fuller, 1964, The Morality of Law, McGraw-Hill: Yale University Press
- Lorens Bagus, 2005, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
- M, Nasroen, 1986, Asal Mula Negara, Cetakan Kedua, Aksara Baru, Jakarta.
- M.D, Moh. Mahfud, 2007, "Putusan MK Belum Tentu Benar", Seputar Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, Teori Dan Politik Konstitusi. Cetakan Pertama. FH UII Press. Yogyakarta.
- Nazriyah, Riri, 2002, Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional pemimpin-pemimpin bangsa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta Press Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010 Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti Sinar Harapan, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, 2000 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Jakarta.
- Soegito, 1997, Pokok-pokok materi: Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Suryasumantri, Jujun S, 1999, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka
- Susanto Anthon F, 2008, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Susanto, Astrid S, 1999 Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Dua puluh Satu : Ditjen Dikti Depdikbud, Jakarta.
- Thalib Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thalib, Dahlan dkk, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ubaedillah. A dan Abdul Rozak, 2014, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta.
- W, Friedman, 1994, Teori dan Filsafat Umum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2005, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Makalah Hukum, Jurnal Hukum dan Tesis**
- Aprilla Haslantini Siregar, 2011, "Kewenangan Gubernur Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Artina, Dessy, (2012), "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/puu-Vi/2008 terhadap Kuota 30% Perempuan." Jurnal Konstitusi, 1-18.
- Balkin, Jack M, "Framework Originalism and The Living Constitution", Northwestern University Law Review, Vol. 103 No.2.

- Darmadi, Nanang Sri, 2011, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang.
- Faqih, Mariyadi, 2010, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Haryono, Dodi. (2021), Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, 18(4), 774-802.
- Indra, Mexasasai, Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 20(2), 279-299.
- Indra, Mexasasai. (2011), "Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review." Jurnal Konstitusi 4.01
- Karim, I. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lex Et Societatis, 6(4).
- Mihradi, R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu. PALAR (Pakuan Law review), 3(2).
- Muda, I. (2018). Fenomena Two in One Pengujian Perppu. Jurnal Konstitusi, 15(2), 257-281.
- Nasrullah, N. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(1), 23-62.
- Sapri, Lauddin Marsuni, Askari Razak, 2022, Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang. Journal of Lex Generalis, halaman 1438-1451, Volume 3, No. 9.
- Toloh, P. W. Y. (2020). Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK NO. 138/PUU-VII/2009. LEX ADMINISTRATUM, 8(3).
- Wardaya, M. K. (2010). Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Jurnal Konstitusi, 7(2), 19-46.
- Zulhidayat, Muhammad, (2020), "Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia." JHR (Jurnal Hukum Replik), 1-18.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) beserta Perubahannya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi beserta Perubahannya

Website

<http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-kewenangan-mahkamah.html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2025, pada pukul 14.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526a75edd6771/mk-berwenang-uji-perppu>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 8 Januari 2025, pada pukul 14.00 WIB.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/24/yusril-mk-tidak-berhak-uji-Perppuq>

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian> diakses pada 5 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/>